



Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pengangguran Dan Ketimpangan Pendapatan Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2015-2024

Sabrina Nabila¹, Siti Nurjanah², Siti Fatimah Zahra³

Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta^{1,2,3}

*Email Korespodensi sabrinanabila_1701621035@mhs.unj.ac.id

Diterima: 06-01-2026 | Disetujui: 16-01-2026 | Diterbitkan: 18-01-2026

ABSTRACT

This study aims to examine the influence of the Human Development Index, Unemployment, and Income Inequality on Poverty in Indonesia in 2015-2024. This study uses a census or total sampling, which is a sampling technique by using all members of the population as samples. The sample criteria used in this study are the entire population, namely 34 provinces in Indonesia in 2015 to 2024. This study uses panel data regression analysis techniques. The following conclusions can be drawn: (a) The Human Development Index has been significantly proven to reduce poverty in Indonesia in 2015-2024. Where increasing the Human Development Index through education, health, and a decent standard of living can create a positive effect, namely making people healthier and more educated so that they will be more productive, can be economically independent, and ultimately can escape the poverty trap permanently; (b) Unemployment has not been proven to reduce poverty in Indonesia in 2015-2024. This is supported by the phenomenon of poor workers (working poor) where poverty is not caused by the absence of work, but by the low quality of work. Poverty alleviation policies should not focus solely on reducing poverty levels, but also need to be directed at improving the quality of employment and expanding people's economic capabilities; and (c) Income inequality is an important determinant that significantly influences poverty levels in Indonesia. Policies that promote income equality and expand access to economic resources have been proven to reduce poverty levels sustainably.

Keywords: Human Development Index, Unemployment, Income Inequality, Poverty

ABSTRAK

Penelitian ini untuk melihat Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pengangguran Dan Ketimpangan Pendapatan Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2015-2024. Pada penelitian ini menggunakan sensus atau sampling total yang merupakan teknik pengambilan sampel dengan cara menggunakan seluruh anggota populasi sebagai sampel. Kriteria sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah seluruh populasi yaitu 34 provinsi di Indonesia pada tahun 2015 hingga 2024. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi data panel. Dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: (a)Indeks Pembangunan Manusia secara signifikan terbukti dapat menurunkan kemiskinan di Indonesia pada tahun 2015-2024. Dimana peningkatan IPM melalui pendidikan, kesehatan dan standar hidup yang layak dapat menciptakan efek yang positif yaitu dapat membuat masyarakat lebih sehat dan terdidik sehingga akan lebih produktif, dapat mandiri secara ekonomi, dan pada akhirnya dapat mampu keluar dari jerat kemiskinan secara permanen; (b) Pengangguran belum terbukti dapat mengurangi kemiskinan di Indonesia pada tahun 2015-2024. Hal ini didukung dengan fenomena working poor (pekerja miskin) di mana kemiskinan tidak disebabkan oleh ketiadaan pekerjaan, melainkan oleh rendahnya kualitas pekerjaan. Kebijakan pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada penurunan tingkat pengangguran, tetapi juga perlu diarahkan pada peningkatan kualitas pekerjaan dan perluasan kapabilitas ekonomi masyarakat; dan (c) Ketimpangan Pendapatan merupakan determinan

penting yang berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Kebijakan yang mendorong pemerataan pendapatan serta perluasan akses terhadap sumber daya ekonomi terbukti dapat menekan tingkat kemiskinan secara berkelanjutan

Katakunci: Indeks Pembangunan Manusia, Pengangguran, Ketimpangan Pendapatan, Kemiskinan

Bagaimana Cara Sitas Artikel ini:

Nabila, S., Nurjanah , S., & Zahra, S. F. (2026). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pengangguran Dan Ketimpangan Pendapatan Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2015-2024. Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi, 2(1), 813-833. <https://doi.org/10.63822/1fv89v21>

PENDAHULUAN

Kemiskinan masih menjadi permasalahan struktural yang dihadapi oleh Indonesia hingga saat ini. Meskipun perekonomian nasional menunjukkan tren pertumbuhan yang relatif stabil, penurunan angka kemiskinan belum sepenuhnya mencerminkan perbaikan kesejahteraan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Kemiskinan tidak hanya mencerminkan rendahnya tingkat pendapatan, tetapi juga keterbatasan akses masyarakat terhadap pendidikan, layanan kesehatan, serta kesempatan kerja yang layak. Oleh karena itu, kemiskinan merupakan indikator utama dalam menilai keberhasilan pembangunan ekonomi dan sosial suatu negara, khususnya dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia (Moatsos & Lazopoulos, 2021).

Di Indonesia, kesejahteraan masyarakat menunjukkan adanya kemajuan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan publikasi *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2024* oleh Badan Pusat Statistik (BPS), berbagai capaian positif terlihat dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), menurunnya angka kemiskinan, serta membaiknya akses terhadap pendidikan serta layanan kesehatan. Walaupun demikian, capaian ini belum sepenuhnya merata. Ketimpangan antar wilayah, tingginya angka ketergantungan, dan masih terdapat kelompok masyarakat yang hidup dalam kondisi rentan menjadi tantangan nyata dalam pembangunan kesejahteraan yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam perspektif pembangunan, kemiskinan dipahami sebagai fenomena multidimensi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi dan sosial. Kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan dan pendidikan (Romzi et al., 2024). Teori pembangunan menekankan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia, perluasan kesempatan kerja, serta distribusi pendapatan yang lebih merata merupakan prasyarat utama untuk menurunkan tingkat kemiskinan secara berkelanjutan. Todaro dan Smith (2020) menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya diukur dari pertumbuhan output, tetapi dari sejauh mana pembangunan tersebut mampu mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan secara simultan. Dengan demikian, analisis kemiskinan perlu mempertimbangkan berbagai variabel yang saling berinteraksi, bukan hanya faktor pendapatan semata.

Indonesia sebagai negara berkembang dengan populasi mencapai lebih dari 270 juta jiwa, masih dihadapi dengan tantangan kemiskinan yang cukup tinggi. Meskipun tingkat kemiskinan mengalami penurunan dibanding periode sebelumnya, jumlah tersebut masih menunjukkan bahwa terdapat jutaan orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Tidak merataanya distribusi pendapatan, terbatasnya akses terhadap pendidikan dan kesehatan serta banyaknya pengangguran maupun pekerjaan di sektor informal dengan upah rendah menjadi penyebab sebagian masyarakat tetap berada di bawah garis kemiskinan.

Kesenjangan yang terjadi antara wilayah perkotaan dan pedesaan masih menjadi masalah dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Berdasarkan data BPS per September 2024, jumlah penduduk miskin pada wilayah perdesaan mencapai 13,01 juta orang atau setara dengan 11,34% dari total penduduk, sedangkan di wilayah perkotaan hanya sebesar 6,66% atau 11,05 juta jiwa. Hal tersebut menunjukkan bahwa penduduk yang berada dalam wilayah pedesaan masih menghadapi tantangan yang lebih besar dalam hal mengakses pendidikan, layanan kesehatan, lapangan pekerjaan serta infrastruktur yang memadai. Kesenjangan tersebut semakin terlihat pada wilayah Maluku dan Papua yang persentase penduduk miskin di wilayah pedesaan mencapai 25,43% yaitu setara dengan 1,30 juta orang yang mana persentase tersebut

jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan kawasan lainnya. Pada sisi lain, penduduk miskin di pulau Jawa lebih banyak karena kepadatan penduduk akan tetapi persentase kemiskinan relatif lebih rendah, khususnya di perkotaan (6,81%). Data tersebut menggambarkan kemiskinan yang terjadi di Indonesia semata tidak hanya dipengaruhi oleh tingkat pendapatan semata, akan tetapi juga dipengaruhi oleh ketimpangan spasial, ketersediaan fasilitas publik yang memadai serta efektifnya distribusi pembangunan infrastruktur antar wilayah.

Kondisi kemiskinan di Indonesia secara empiris masih menunjukkan tantangan yang cukup kompleks. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa selama periode 2015–2024, tingkat kemiskinan di Indonesia cenderung menurun, namun penurunannya berlangsung relatif lambat dan tidak merata antar wilayah. Disparitas kemiskinan antara wilayah perkotaan dan perdesaan masih cukup tinggi, terutama di kawasan Indonesia Timur. Selain itu, pandemi COVID-19 yang terjadi pada periode 2020–2021 memberikan tekanan besar terhadap pasar tenaga kerja, yang ditandai dengan meningkatnya tingkat pengangguran dan kembali naiknya angka kemiskinan.

Pada saat yang sama, capaian IPM Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun peningkatan tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh penurunan kemiskinan yang signifikan di seluruh provinsi. Beberapa daerah dengan IPM relatif tinggi masih menghadapi tingkat kemiskinan yang cukup besar, yang mengindikasikan bahwa peningkatan kualitas manusia belum sepenuhnya terkonversi menjadi kesejahteraan ekonomi. Di sisi lain, ketimpangan pendapatan yang tercermin dari nilai Gini Ratio masih berada pada kategori sedang dan cenderung persisten, menunjukkan bahwa hasil pembangunan ekonomi belum terdistribusi secara optimal.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji pengaruh IPM, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan terhadap kemiskinan. Zanzibar et al., (2024) menemukan bahwa peningkatan IPM berpengaruh signifikan dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Sementara itu, Sembiring et al., (2023) menunjukkan bahwa pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Penelitian Yulsa & Idris (2024) juga menyimpulkan bahwa ketimpangan pendapatan memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan kemiskinan di Indonesia. Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih bersifat parsial, baik dari sisi variabel yang digunakan maupun cakupan wilayah dan periode analisis.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat kebutuhan akan penelitian yang mengkaji kemiskinan secara lebih komprehensif dengan mengintegrasikan Indeks Pembangunan Manusia, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan dalam satu kerangka analisis. Penggunaan data panel seluruh provinsi di Indonesia selama periode 2015–2024 menjadi penting untuk menangkap dinamika antar wilayah dan antar waktu, termasuk dampak sebelum, saat, dan setelah pandemi COVID-19. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris yang lebih kuat serta menjadi dasar pertimbangan bagi perumusan kebijakan pengentasan kemiskinan yang lebih efektif, inklusif, dan berbasis data di Indonesia. Sehingga peneliti memilih judul penelitian: **Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pengangguran dan Ketimpangan Pendapatan terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia tahun 2015-2024**

METODE PENELITIAN

Unit Analisis, Populasi, dan Sampel

Unit analisis dalam penelitian ini adalah 34 Provinsi di Indonesia pada periode tahun 2015 hingga 2024 dengan menggunakan data panel (gabungan data *time series* dan *cross section*) dengan total data 340 observasi

Adapun populasi pada penelitian ini adalah seluruh Provinsi yang ada di Indonesia.

Pada penelitian ini menggunakan sensus atau sampling total yang merupakan teknik pengambilan sampel dengan cara menggunakan seluruh anggota populasi sebagai sampel. Kriteria sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah seluruh populasi yaitu 34 provinsi di Indonesia pada tahun 2015 hingga 2024.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data sekunder, yakni data yang diperoleh dari instansi resmi pemerintah yang telah dipublikasikan sebelumnya. Sumber utama data berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang digunakan untuk memperoleh informasi mengenai Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Gini Rasio (sebagai indikator ketimpangan pendapatan) dan Tingkat Kemiskinan (persentase penduduk miskin), beserta dokumentasi dan studi literatur yang mendukung penelitian.

Teknik Analisis

Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi data panel sebagai metode untuk menguji pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Ketimpangan Pendapatan (Gini Rasio) terhadap Tingkat Kemiskinan pada 34 Provinsi di Indonesia selama periode 2015-2024.

Analisis regresi data panel diawali dengan menentukan model estimasi yang paling sesuai untuk digunakan dalam penelitian. Pada metode estimasi model regresi dengan menggunakan data panel dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, antara lain:

1) Common Effect Model (CEM)

Common Effect Model atau dikenal juga dengan *Pooled Least Square* (PLS) merupakan pendekatan yang paling sederhana dalam analisis regresi data panel. Model ini mengasumsikan bahwa tidak ada perbedaan karakteristik antara unit cross-section maupun antar waktu, sehingga seluruh data dianggap homogen dan perilaku tiap individu/unit dianggap sama dalam setiap periode waktu. Oleh karena itu, dalam model ini tidak diperhitungkan adanya efek waktu (time effect) maupun efek individu (individual effect). Model ini menggabungkan data cross section dan time series dalam satu bentuk kumpulan data (pooling data), dan metode estimasinya dilakukan menggunakan pendekatan Ordinary Least Square (OLS) atau metode kuadrat terkecil. Adapun bentuk umum persamaan dari model Common Effect ini dirumuskan sebagai:

$$Y_{it} = \alpha + X_{1it} \beta_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan :

Y : Variabel Dependen

α : Konstanta
 X_1 : Variabel Independen 1
 β : Koefisien Regresi
 ε : Error Terms
 t : Periode Waktu / Tahun
 i : Cross Section (Individu)

2) Fixed Effect Model (FEM)

Fixed Effect Model adalah metode regresi yang mengestimasi data panel dengan menambahkan variabel *dummy*. Model ini mengasumsikan bahwa perbedaan antar individu dapat diakomodasi dari perbedaan intersepnya. Maka dari itu, pada model ini, setiap individu merupakan parameter yang tidak diketahui dan akan diestimasi dengan menggunakan teknik variabel *dummy* yang dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha_i + \beta_j X_{j,it} + \sum_{n=1}^N \alpha_n D_n + \varepsilon_{it}$$

Y_{it} : Variabel terikat untuk individu ke- i pada waktu ke- t

$X_{j,it}$: Variabel bebas ke- j untuk individu ke- i pada waktu ke- t

D_i : Dummy Variabel

ε_{it} : Komponen eror untuk individu ke- i waktu ke- t

α : intercept

β_j : Parameter untuk variabel ke- j

Model estimasi ini juga dikenal dengan teknik *Least Squares Dummy Variable* (LSDV). Selain digunakan untuk mengestimasi efek spesifik antar individu, model ini juga dapat mengakomodasi pengaruh waktu yang bersifat sistematis. Hal ini diperoleh dengan cara menambahkan variabel dummy waktu ke dalam model estimasi.

3) Random Effect Model (REM)

Random Effect Model merupakan pendekatan dalam analisis data panel yang mengakomodasi kemungkinan adanya korelasi antar error terms baik dalam dimensi waktu maupun antar individu. Dalam model ini, variasi intersep antar unit analisis diasumsikan sebagai bagian dari komponen error secara acak. Salah satu keunggulan dari penggunaan REM adalah kemampuannya dalam mengatasi masalah heteroskedastisitas. Maka dari itu, model ini sering juga dikenal sebagai *Error Component Model* (ECM) atau diestimasi menggunakan metode *Generalized Least Square* (GLS).

Ghozali & Ratmono (2017) dalam bukunya menyatakan bahwa dalam menentukan model estimasi yang paling tepat antara ketiga data tersebut, terdapat beberapa pengujian yang dapat dilakukan, yaitu:

1) Uji Likelihood Test Ratio (*Chow Test*)

Uji *chow* dilakukan untuk membandingkan atau memilih mana model yang terbaik antara *Fixed Effect Model* dan *Random Effect Model*. Pengambilan keputusan dengan melihat nilai probabilitas (p) untuk *Cross-Section F*. Jika nilai $p > 0,05$ maka model yang terpilih adalah *Common Effect Model*. Tetapi jika $p < 0,05$ maka model yang dipilih adalah *Fixed Effect Model*.

2) Uji *Hausman*

Uji *Hausman* dilakukan untuk membandingkan atau memilih mana model yang terbaik antara *Fixed Effect Model* dan *Random Effect Model*. Pengambilan keputusan dengan melihat nilai probabilitas (p) untuk *Cross-Section Random*, Jika nilai $p > 0,05$ maka model yang terpilih adalah *Random Effect Model*. Tetapi jika $p < 0,05$ maka model yang dipilih adalah *Fixed Effect Model*.

3) Uji Lagrange Multiplier

Uji *Lagrange Multiplier* dilakukan untuk membandingkan atau memilih mana model yang terbaik antara *Fixed Effect Model* dan *Random Effect Model*. Apabila nilai *cross section* bagian *Breusch-Pagan* $\leq 5\%$ (0,05) maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Jika nilai *cross section* *Breausch-Pagan* $\geq 0,05$ (5%) maka H_0 diterima dan H_a ditolak yang berarti apabila *cross section Breausch-Pagan* $< 0,05$, maka *Random Effect Model* lebih tepat digunakan dan apabila *cross section Breusch-Pagan* $> 0,05$ lebih tepat menggunakan *Common Effect Model*.

Uji prasyarat dilakukan untuk memverifikasi apakah terdapat hubungan linier antar variabel yang diteliti dan memastikan bahwa data yang akan digunakan terdistribusi secara normal.

1) Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah bahwa setiap fungsi linier dari variabel terdistribusi normal atau tidak (Gujarati, 2004). Pengujian ini dapat dilihat dari nilai probabilitas nilai *Jarque-Berra* dengan kriteria:

- Jika hasil dari probabilitas *Jarque-Berra* $< 5\%$ (0,05) maka H_a diterima (signifikan), artinya data bersifat tidak normal

- Jika hasil dari probabilitas $Jarque-Berra > 5\% (0,05)$ maka H_0 ditolak (tidak signifikan), artinya data bersifat normal (residual berdistribusi normal).

Setelah penemuan model regresi yang sesuai, pengujian hipotesis klasik dapat dilakukan. Uji asumsi klasik untuk panel data yaitu uji multikolinearitas, dan heteroskedastisitas.

1) Uji Multikolinearitas

Menurut Gujarati (2004) salah satu asumsi model regresi linier klasik yaitu tidak terdapat multikolinearitas antar variabel independen. Diartikan secara luas, multikolinearitas mengacu kepada situasi dimana adanya hubungan linear eksak atau mendekati eksak di antara variabel independen. Maka dari itu, uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antar variabel independen dalam model regresi. Untuk mengetahui multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Jika nilai *tolerance* $\leq 0,10$ dan nilai $VIF \geq 10$ maka dapat disimpulkan bahwa penelitian tersebut terdapat multikolinieritas. Selain dengan menggunakan nilai VIF, bisa juga dengan membandingkan nilai koefisien korelasi. Jika koefisien korelasi melebihi 0,8, maka multikolinieritas merupakan masalah yang serius (Gujarati, 2004).

2) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan dalam varian residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik yaitu ketika tidak terjadi heteroskedastisitas. Jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas dan apabila nilai signifikansi $< 0,05$ maka terdapat masalah heteroskedastisitas.

Selain menggunakan uji asumsi klasik, pada penelitian ini juga menggunakan uji statistik atau signifikansi yaitu:

1) Uji T (Individu/Parsial)

Uji stastistik t merupakan sebuah pengujian yang memiliki tujuan untuk mengukur tingkat signifikansi setiap variabel bebas terhadap variabel terikat pada suatu model regresi linear. Pengujian dilakukan dengan menggunakan significance level 0,05 ($\alpha=5\%$). Apabila nilai signifikan $> 0,05$ maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan). Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel independen tersebut tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikan $\leq 0,05$ maka hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan). Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel independen tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

2) Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (*goodness of fit*), adalah suatu ukuran yang penting dalam regresi. Koefisien determinasi merupakan suatu koefisien yang menunjukkan besarnya variasi yang ditimbulkan oleh variabel bebas yang dinyatakan dengan persentase. Nilai R^2 menunjukkan seberapa besar pengaruh proporsi dari total variasi variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh variabel penjelasnya. Koefisien ini menunjukkan berapa proporsi variasi dalam variabel terikat yang dijelaskan oleh variabel penjelas.

Nilai R^2 atau $Adjusted R^2$ yaitu terletak diantara nol dan satu ($0 \leq R^2 \leq 1$). Jika nilainya semakin mendekati satu, maka model tersebut baik dan tingkat kedekatan antara variable bebas dan variable terikat semakin dekat. Apabila koefisien determinasi $> 0,5$ maka pemilihan variable X1 dan X2 terhadap Y sudah benar. Jika koefisien determinasi $< 0,5$ maka pemilihan variable X1 dan X2 terhadap Y tidak tepat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persamaan Regresi Data Panel

Estimasi model regresi data panel dalam penelitian ini dilakukan dengan bantuan program EViews 12 menggunakan Fixed Effect Model (FEM) dengan robust standard error metode White cross-section yang disesuaikan dengan clustering periode. Penggunaan robust standard error ini bertujuan untuk mengoreksi potensi heteroskedastisitas dan korelasi residual, sehingga nilai standar error, uji t, dan probabilitas yang dihasilkan tetap valid secara statistik. Hasil estimasi regresi data panel disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1 Hasil Regresi Data Panel FEM

Dependent Variable: Y
Method: Panel Least Squares
Date: 01/03/26 Time: 19:58
Sample: 2015 2024
Periods included: 10
Cross-sections included: 34
Total panel (balanced) observations: 340
White cross-section (period cluster) standard errors & covariance (d.f.
corrected)
Standard error and t-statistic probabilities adjusted for clustering

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	30.79874	7.580949	4.062650	0.0028
X1	-0.350350	0.081055	-4.322359	0.0019
X2	0.087805	0.113655	0.772556	0.4596
X3	12.39896	4.920484	2.519865	0.0328

Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.985952	Mean dependent var	10.70294	
Adjusted R-squared	0.984283	S.D. dependent var	5.558792	
S.E. of regression	0.696896	Akaike info criterion	2.218074	
Sum squared resid	147.1563	Schwarz criterion	2.634753	
Log likelihood	-340.0725	Hannan-Quinn criter.	2.384103	
F-statistic	590.7144	Durbin-Watson stat	1.030302	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber : Eviews 12, diolah oleh penulis

Berdasarkan hasil estimasi tersebut, diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$Y = 30.7987383718 - 0.350350260259*X1 + 0.0878049026743*X2 + 12.3989562628*X3$$

1. Nilai konstanta sebesar 30,8 menunjukkan bahwa jika variabel X1 (IPM), X2 (Pengangguran), dan X3 (Ketimpangan Pendapatan) dianggap tetap atau bernilai nol, maka tingkat kemiskinan diprediksi sebesar 30,8%. Namun, kondisi seluruh variabel bernilai nol bersifat hipotesis, sehingga konstanta lebih berfungsi sebagai titik awal model.
2. Koefisien variabel IPM (X1) sebesar -0,35 yang berarti setiap peningkatan IPM sebesar 1 poin indeks akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0,35 persen dengan asumsi variabel lain bersifat tetap. Hal ini sesuai dengan teori pembangunan manusia yang menyatakan bahwa peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan standar hidup masyarakat berkontribusi pada penurunan tingkat kemiskinan.
3. Koefisien variabel pengangguran (X2) sebesar 0,088 menunjukkan bahwa setiap kenaikan pengangguran sebesar 1 persen akan meningkatkan kemiskinan sebesar 0,088 persen dengan asumsi variabel lain tetap. Hal ini mengindikasikan bahwa bertambahnya jumlah pengangguran memiliki potensi untuk mengurangi pendapatan masyarakat sehingga dapat mendorong peningkatan jumlah penduduk miskin.
4. Koefisien variabel ketimpangan pendapatan (X3) sebesar 12,39 menunjukkan hubungan positif antara ketimpangan pendapatan dan tingkat kemiskinan. Mengingat Gini Ratio merupakan indeks dengan rentang 0 hingga 1, maka interpretasi dilakukan secara proporsional. Setiap kenaikan Gini Ratio sebesar 0,01 poin indeks akan meningkatkan kemiskinan sekitar 0,124 poin persentase, dengan asumsi variabel lain konstan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi ketimpangan distribusi pendapatan, maka semakin besar kecenderungan meningkatnya kemiskinan.

Pengujian Hipotesis

a. Uji T

Uji t bertujuan untuk menguji signifikansi pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen dalam model regresi. Pengujian dilakukan pada tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$, di mana Prob. $< 0,05$ menunjukkan pengaruh signifikan dan Prob. $> 0,05$ menunjukkan pengaruh tidak signifikan. Berdasarkan pengujian dua sisi, nilai t-tabel diperoleh sebesar 1,96, dengan derajat kebebasan ($n-k-1$) = $340-3-1 = 336$ derajat kebebasan.

Tabel 2 Uji T

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	30.79874	7.580949	4.062650	0.0028
X1	-0.350350	0.081055	-4.322359	0.0019
X2	0.087805	0.113655	0.772556	0.4596
X3	12.39896	4.920484	2.519865	0.0328

Sumber : Eviews 12, diolah oleh penulis

Interpretasi dari hasil uji parsial pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Hasil uji t pada variabel IPM (X1) diperoleh nilai t-Statistic (t_{hitung}) 4,33359 yang berarti $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $4,33 > 1,96$ dan nilai sig $0,0019 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa IPM memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.
2. Hasil uji t pada variabel Pengangguran (X2) diperoleh nilai t-Statistic (t_{hitung}) 0,772556 yang berarti $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $0,77 < 1,96$ dan nilai sig. $0,4596 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa Pengangguran tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.
3. Hasil uji t pada variabel Ketimpangan Pendapatan (X3) diperoleh nilai t-Statistic (t_{hitung}) 2,519865 yang berarti $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,51 > 1,96$ dan nilai sig $0,0328 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa Ketimpangan Pendapatan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.

b. Uji F

Pengujian pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen dilakukan melalui uji F. Pada tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$), uji F digunakan untuk menilai apakah variabel dependen dapat dijelaskan secara bersama-sama oleh variabel independen dalam model regresi. Nilai F-tabel pada taraf signifikansi 5% ditentukan berdasarkan derajat kebebasan, yaitu $df_1 = k = 3$ dan $df_2 = n - k - 1 = 336$. Perhitungan nilai F-tabel dilakukan menggunakan bantuan program Microsoft Excel dengan rumus $=F.INV.RT(0.05, 3, 336)$ dan diperoleh nilai F-tabel sebesar 2,63.

Tabel 3 Uji F

F-statistic	590.7144
Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber : Eviews 12, diolah oleh penulis

Hasil uji F diperoleh nilai F-statistic (f_{hitung}) 590,7144 yang berarti $f_{hitung} > f_{tabel}$ yaitu $590,7144 > 2,63$ dan nilai probabilitas nya lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel IPM, Pengangguran dan Ketimpangan Pendapatan memiliki pengaruh signifikan terhadap Kemiskinan di Indonesia pada tahun 2015-2024.

c. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui sejauh mana variabel independen dalam model mampu menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai R^2 berada pada rentang 0 hingga 1, di mana semakin mendekati 1 menunjukkan semakin besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan perubahan variabel dependen.

Tabel 4. Uji Koefisien Determinasi

R-squared	0.985952
Adjusted R-squared	0.984283

Sumber : Eviews 12, diolah oleh penulis

Nilai *Adjusted R-squared* sebesar 0,984283 menunjukkan bahwa sebesar 98,43 persen variasi tingkat kemiskinan dapat dijelaskan oleh variabel Indeks Pembangunan Manusia, Pengangguran, dan Ketimpangan Pendapatan serta efek tetap masing-masing provinsi. Sementara itu, sisanya sebesar 1,57 persen dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian ini.

Pembahasan

1. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (X1) terhadap Kemiskinan (Y)

Hasil estimasi menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di 34 provinsi di Indonesia dengan nilai sebesar -0,350350. Nilai koefisien yang negatif mengindikasikan adanya hubungan yang berlawanan arah yang berarti setiap peningkatan capaian IPM akan berdampak terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia.

Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Dahliah & Nirwana Nur (2021); Maskur et al., (2023); Arianto & Cahyono (2025); yang menunjukkan adanya hubungan negatif antara kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia, yang mana penurunan kemiskinan cenderung diikuti dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia.

Meningkatnya IPM melalui komponen pendidikan membuat masyarakat mempunyai keterampilan serta pengetahuan yang lebih baik, yang memungkinkan mereka untuk masuk ke pasar tenaga kerja dengan upah yang lebih tinggi dan juga dapat menciptakan lapangan kerja sendiri. Pada sisi lain, peningkatan IPM melalui komponen kesehatan memastikan produktivitas tenaga kerja tetap optimal karena berkurangnya hari kerja yang hilang akibat sakit. Pendidikan yang baik serta kesehatan yang prima akan meningkatkan produktivitas yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan per kapita dan mengangkat rumah tangga keluar dari kemiskinan.

Secara teoritis, hubungan negatif antara IPM dan kemiskinan sejalan dengan kerangka teori pembangunan ekonomi Todaro & Smith (2020). Todaro dan Smith berpandangan bahwa pembangunan tidak dapat dipahami hanya sebagai peningkatan pendapatan atau output ekonomi, melainkan harus mencakup peningkatan kualitas hidup manusia secara menyeluruh. Investasi dalam modal manusia (*human capital*) merupakan hal penting khususnya melalui pendidikan dan kesehatan. Todaro dan Smith berpendapat bahwa pendidikan dan kesehatan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar sekaligus sarana untuk mencapai kemajuan ekonomi. Ketika negara berinvestasi pada peningkatan IPM, negara tersebut sejatinya sedang meningkatkan “kapabilitas” penduduknya untuk berproduksi. Perbaikan kualitas sumber daya manusia ini akan menambah efisiensi serta produktivitas tenaga kerja, yang merupakan syarat mutlak bagi pertumbuhan ekonomi inklusif yang mampu menyerap tenaga kerja dan mengurangi kemiskinan.

Penelitian ini juga dapat dijelaskan melalui teori kapabilitas yang dikemukakan oleh Amartya Sen (1999). Menurut Sen, kemiskinan tidak hanya dipahami sebagai kekurangan pendapatan, melainkan sebagai kondisi keterbatasan kapabilitas (*capability deprivation*), yaitu ketidakmampuan individu untuk mencapai fungsi-fungsi dasar dalam kehidupan. Peningkatan IPM mencerminkan perluasan kapabilitas masyarakat melalui peningkatan pendidikan, perbaikan derajat kesehatan dan peningkatan standar hidup. Dengan kapabilitas yang lebih baik, individu memiliki peluang yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi produktif, sehingga risiko terjebak dalam kemiskinan dapat diminimalkan.

Secara empiris pada kurun waktu 2015-2024, pengaruh negatif IPM terhadap kemiskinan di Indonesia didorong oleh keberhasilan program pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pada sisi pendidikan, terdapat program seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Prakerja yang dapat membantu masyarakat untuk memiliki keterampilan kerja yang lebih baik. Meningkatkan keterampilan dapat membuat masyarakat lebih mudah mendapatkan pekerjaan atau membuka usaha untuk menghasilkan pendapatan yang layak. Pada sisi lain, perbaikan dimensi kesehatan, program JKN-KIS (BPJS) berperan penting dalam melindungi keuangan keluarga miskin. Karena biaya pengobatan telah ditanggung negara, pendapatan mereka tidak habis terkuras untuk biaya penyembuhan penyakit, melainkan dapat digunakan untuk kebutuhan pokok lainnya. Gabungan antara masyarakat yang lebih terampil serta terlindungi kesehatannya inilah yang membuat ketahanan ekonomi keluarga meningkat, sehingga masyarakat dapat keluar dari garis kemiskinan. Meskipun terjadi guncangan ekonomi akibat pandemi COVID-19 pada awal dekade 2020-an, tren peningkatan IPM tetap menunjukkan bahwa investasi pada pembangunan manusia berperan sebagai faktor penahan terhadap lonjakan kemiskinan yang lebih dalam.

Hasil empiris penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan IPM tidak hanya berkorelasi dengan penurunan kemiskinan secara statistik, tetapi juga mencerminkan mekanisme pembangunan yang bekerja melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan perluasan kapabilitas ekonomi masyarakat. Hal ini menguatkan pandangan bahwa kebijakan pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan harus ditempatkan dalam kerangka pembangunan manusia, sebagaimana ditegaskan dalam teori pembangunan ekonomi modern dan pendekatan kapabilitas.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini mengonfirmasi bahwa penanggulangan kemiskinan di Indonesia tidak cukup hanya dengan memberikan bantuan tunai jangka pendek. Strategi yang paling efektif, sebagaimana didukung oleh data statistik dan landasan teori Todaro serta Sen, adalah melalui pembangunan manusia yang berkelanjutan. Peningkatan IPM menciptakan efek yang positif: masyarakat yang lebih sehat dan terdidik akan lebih produktif, lebih mandiri secara ekonomi, dan pada akhirnya mampu keluar dari jerat kemiskinan secara permanen.

2. Pengaruh Pengangguran (X2) terhadap Kemiskinan (Y)

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel pengangguran memiliki hubungan positif terhadap kemiskinan dengan nilai koefisien nya sebesar 0,087805. Walaupun menunjukkan hubungan positif, pengangguran tidak menunjukkan hasil signifikan dengan kemiskinan. Variasi tingkat pengangguran belum dapat menjelaskan perubahan tingkat kemiskinan secara konsisten selama periode penelitian.

Secara empiris, hubungan positif tersebut menunjukkan bahwa peningkatan pengangguran cenderung diikuti oleh peningkatan kemiskinan, namun hubungan tersebut tidak cukup kuat untuk dinyatakan signifikan. Dengan kata lain, perubahan tingkat pengangguran tidak selalu diikuti oleh perubahan tingkat kemiskinan dalam besaran yang konsisten antarprovinsi dan antarwaktu. Hal ini mengisyaratkan bahwa pengangguran bukan satu-satunya faktor penentu kemiskinan, melainkan berinteraksi dengan faktor struktural lain dalam perekonomian.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Rahmaningtyas & Adianita (2023); Marpaung et al., (2023); Fauzi Nur Kholis & Gunarto (2025); yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif dan tidak signifikan antara pengangguran dan kemiskinan.

Hal tersebut mengindikasikan adanya fenomena “*The Working Poor*” (Pekerja Miskin) yang kuat di Indonesia. Fenomena ini merupakan kondisi ketika individu telah bekerja namun pendapatannya belum mampu memenuhi kebutuhan hidup layak.

Pada negara berkembang, kemiskinan tidak selalu identik dengan ketiadaan pekerjaan (pengangguran terbuka). Sebagian besar masyarakat miskin tidak mampu untuk menganggur, dengan kata lain mereka tidak memiliki tabungan atau jaminan sosial yang memadai untuk bertahan hidup tanpa pendapatan saat mencari pekerjaan yang layak. Akibatnya, mereka terpaksa menerima pekerjaan apa saja, seringkali pada sektor informal dengan upah rendah, produktivitas rendah serta jam kerja yang tidak menentu. Pada statistik, mereka tercatat sebagai orang yang memiliki pekerjaan (bukan pengangguran), akan tetapi pendapatan mereka tetap berada di bawah garis kemiskinan. Hal inilah yang menyebabkan data pengangguran tidak berkorelasi kuat dengan data kemiskinan.

Secara teoretis, arah hubungan positif antara pengangguran dan kemiskinan sejalan dengan teori pembangunan ekonomi Todaro & Smith (2020) menjelaskan bahwa pengangguran mencerminkan kegagalan sistem ekonomi dalam menyediakan kesempatan kerja yang produktif. Ketiadaan pekerjaan menyebabkan individu kehilangan sumber pendapatan utama, sehingga meningkatkan risiko jatuh ke dalam kemiskinan. Namun demikian, Todaro dan Smith juga menekankan bahwa hubungan antara pengangguran dan kemiskinan tidak selalu bersifat langsung, karena kondisi pasar tenaga kerja di negara berkembang sering kali ditandai oleh dominasi sektor informal dan setengah menganggur (*underemployment*).

Penjelasan tersebut diperkuat oleh teori kapabilitas yang dikemukakan oleh Amartya Sen (1999). Dalam pandangan Sen, kemiskinan dipahami sebagai keterbatasan kapabilitas, bukan semata-mata ketiadaan pekerjaan formal. Individu yang secara statistik dikategorikan sebagai menganggur tidak selalu berada dalam kondisi miskin apabila masih memiliki kapabilitas lain, seperti akses terhadap jaringan sosial, pekerjaan informal, atau dukungan keluarga. Sebaliknya, individu yang bekerja dapat tetap miskin apabila pekerjaan tersebut bersifat tidak produktif dan berupah rendah. Oleh karena itu, pengangguran sebagai indikator pasar tenaga kerja tidak selalu menggambarkan secara utuh tingkat keterbatasan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup dasarnya.

Selama periode pengamatan, struktur pasar tenaga kerja Indonesia menunjukkan dominasi sektor informal dan berkembangnya *gig economy*, seperti pengemudi ojek daring dan usaha mikro kecil. Kondisi ini menyebabkan sebagian besar tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan formal (terutama pada masa pandemi) dengan cepat beralih ke sektor informal. Secara statistik, kelompok ini tidak lagi diklasifikasikan sebagai pengangguran, namun secara ekonomi mereka berada dalam kondisi rentan karena pendapatannya rendah dan tidak stabil, sehingga sering kali berada di sekitar garis kemiskinan.

Pada sisi lain, peran bantuan sosial pemerintah yang bersifat masif, khususnya pada periode 2020–2022 (masa pandemi COVID-19) melalui berbagai program transfer tunai seperti BLT dan PKH turut menjaga daya beli rumah tangga. Intervensi ini menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan (*decoupling*) antara status pekerjaan dan status kemiskinan, di mana individu yang menganggur tetap mampu mempertahankan tingkat konsumsi per kapita di atas garis kemiskinan sebagaimana diukur oleh BPS.

Karakteristik pengangguran di Indonesia juga menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka lebih banyak didominasi oleh kelompok berpendidikan menengah dan tinggi, seperti lulusan SMK dan perguruan tinggi, yang umumnya berasal dari rumah tangga kelas menengah dan masih memiliki dukungan ekonomi keluarga. Kelompok ini cenderung bersikap *wait and see* dalam memilih pekerjaan sehingga dapat menganggur tanpa langsung jatuh miskin. Sebaliknya, penduduk miskin dengan tingkat pendidikan rendah justru memiliki tingkat pengangguran yang relatif lebih rendah karena terdorong untuk menerima pekerjaan apa pun demi memenuhi kebutuhan hidup, meskipun pekerjaan tersebut bersifat informal dan berupah rendah.

Dengan demikian, meskipun secara teoritis pengangguran berpotensi meningkatkan kemiskinan melalui hilangnya pendapatan dan kesempatan kerja, temuan empiris penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh tersebut belum signifikan secara statistik. Hal ini mengindikasikan bahwa kemiskinan di Indonesia lebih dipengaruhi oleh faktor struktural lain, seperti kualitas pembangunan manusia dan distribusi pendapatan, dibandingkan oleh tingkat pengangguran semata.

Secara umum, hasil penelitian ini menegaskan bahwa pengangguran memiliki hubungan positif dengan kemiskinan, namun bukan determinan utama dalam menjelaskan variasi tingkat kemiskinan di Indonesia selama periode 2015–2024. Oleh karena itu, kebijakan pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada penurunan tingkat pengangguran, tetapi juga perlu diarahkan pada peningkatan kualitas pekerjaan dan perluasan kapabilitas ekonomi masyarakat.

3. Pengaruh Ketimpangan Pendapatan (X3) terhadap Kemiskinan (Y)

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel Ketimpangan Pendapatan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Dengan nilai koefisien sebesar 12.39896. Nilai koefisien yang positif menunjukkan arah hubungan yang searah yaitu semakin tinggi tingkat ketimpangan pendapatan (ratio gini), maka tingkat kemiskinan juga akan meningkat. Sebaliknya, penurunan ketimpangan akan diikuti dengan penurunan angka kemiskinan.

Hubungan positif tersebut menunjukkan bahwa ketika ketimpangan pendapatan semakin timpang, manfaat pertumbuhan ekonomi tidak dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Tingginya ketimpangan pendapatan menciptakan jurang pemisah yang menghambat efektivitas pertumbuhan ekonomi dalam mengurangi kemiskinan.

Kondisi tersebut dapat menyebabkan kelompok berpendapatan rendah mengalami keterbatasan dalam meningkatkan kesejahteraan sehingga proporsi penduduk miskin cenderung meningkat. Temuan ini menegaskan bahwa kemiskinan tidak hanya dipengaruhi oleh rendahnya pendapatan rata-rata, tetapi juga oleh bagaimana pendapatan tersebut terdistribusi di dalam masyarakat.

Hasil penelitian ini selaras dengan argumen Todaro & Smith (2020) tentang pentingnya pertumbuhan yang disertai dengan pemerataan (*growth with equity*). Todaro menegaskan bahwa ketimpangan yang tinggi akan membatasi dampak positif dari pertumbuhan ekonomi terhadap pengentasan kemiskinan. Ketimpangan menyebabkan kelompok miskin memiliki akses yang terbatas terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi, sehingga sulit keluar dari perangkap kemiskinan. Dengan kata lain, ketimpangan pendapatan memperlemah efek pemerataan dari pertumbuhan ekonomi dan berpotensi memperbesar jumlah penduduk miskin.

Penjelasan tersebut diperkuat oleh teori kapabilitas yang dikemukakan oleh Amartya Sen (1999). Menurut Sen, kemiskinan merupakan bentuk keterbatasan kapabilitas (*capability deprivation*), yaitu ketidakmampuan individu untuk mengakses dan memanfaatkan sumber daya yang diperlukan guna menjalani kehidupan yang layak. Ketimpangan pendapatan yang tinggi menunjukkan distribusi sumber daya yang tidak merata, sehingga sebagian kelompok masyarakat mengalami keterbatasan dalam mengembangkan kapabilitas dasar, seperti memperoleh pendidikan yang layak, menjaga kesehatan, dan berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi produktif. Akibatnya, ketimpangan pendapatan secara langsung meningkatkan risiko kemiskinan.

Secara empiris, pengaruh positif ketimpangan terhadap kemiskinan di Indonesia pada periode 2015-2024 dapat dikaitkan dengan fenomena *K-Shaped Recovery* khususnya pasca pandemi covid-19 (2020-2022) yang memperparah ketimpangan. Sektor formal, digital, dan padat modal (yang didominasi kelas menengah-atas) pulih dengan cepat, sementara sektor informal, pariwisata, dan UMKM (tempat bergantungnya masyarakat miskin) terpuruk lebih lama. Akumulasi aset pada kelompok atas meningkat tajam, sementara kelompok bawah kehilangan pendapatan, sehingga ketimpangan yang melebar ini secara langsung meningkatkan kerentanan dan kedalaman kemiskinan.

Selain itu, juga terdapat kesenjangan digital yang mana masyarakat dengan akses internet dan literasi digital tinggi (yang biasanya terlihat pada kelompok pendapatan atas) dapat memanfaatkan hal tersebut untuk meningkatkan kekayaan. Sebaliknya, masyarakat miskin yang gagap teknologi tertinggal. Sehingga memperlebar jurang pendapatan dan menghambat upaya pengentasan kemiskinan.

Disparitas pembangunan antara wilayah jawa dan luar jawa juga menyebabkan adanya ketimpangan. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada periode tersebut belum sepenuhnya dinikmati secara merata, terutama antara wilayah perkotaan dan perdesaan serta antara kawasan barat dan timur Indonesia. Meskipun pembangunan infrastruktur gencar dilakukan, konsentrasi perputaran uang dan aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi masih terpusat di Pulau Jawa dan kawasan perkotaan. Ketimpangan spasial ini menyebabkan penurunan kemiskinan di daerah tertinggal berjalan lambat dibandingkan daerah maju, sehingga secara agregat nasional, ketimpangan masih menjadi pendorong angka kemiskinan. Selain itu, perbedaan akses terhadap pendidikan berkualitas, lapangan kerja formal, dan infrastruktur ekonomi turut memperkuat ketimpangan pendapatan, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kerentanan kelompok berpendapatan rendah terhadap kemiskinan. Meskipun berbagai program perlindungan sosial telah dijalankan, ketimpangan distribusi pendapatan tetap menjadi tantangan struktural dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan merupakan determinan penting yang berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Temuan ini mengarah pada kesimpulan bahwa upaya pengurangan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus disertai dengan kebijakan yang mendorong pemerataan pendapatan dan perluasan akses terhadap sumber daya ekonomi. Dengan demikian, pembangunan yang inklusif dan berkeadilan menjadi prasyarat utama dalam menekan tingkat kemiskinan secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan uji analisis mengenai Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pengangguran dan Ketimpangan Pendapatan terhadap Kemiskinan di Indonesia pada tahun 2015-2024 yang dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Indeks Pembangunan Manusia secara signifikan terbukti dapat menurunkan kemiskinan di Indonesia pada tahun 2015-2024. Dimana peningkatan IPM melalui pendidikan, kesehatan dan standar hidup yang layak dapat menciptakan efek yang positif yaitu dapat membuat masyarakat lebih sehat dan terdidik sehingga akan lebih produktif, dapat mandiri secara ekonomi, dan pada akhirnya dapat mampu keluar dari jerat kemiskinan secara permanen.
2. Pengangguran belum terbukti dapat mengurangi kemiskinan di Indonesia pada tahun 2015-2024. Hal ini didukung dengan fenomena *working poor* (pekerja miskin) di mana kemiskinan tidak disebabkan oleh ketiadaan pekerjaan, melainkan oleh rendahnya kualitas pekerjaan. Kebijakan pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada penurunan tingkat pengangguran, tetapi juga perlu diarahkan pada peningkatan kualitas pekerjaan dan perluasan kapabilitas ekonomi masyarakat.
3. Ketimpangan Pendapatan merupakan determinan penting yang berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Kebijakan yang mendorong pemerataan pendapatan serta perluasan akses terhadap sumber daya ekonomi terbukti dapat menekan tingkat kemiskinan secara berkelanjutan

Implikasi

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, penelitian ini menghasilkan implikasi yang relevan bagi pengembangan ilmu pengetahuan (implikasi teoritis) maupun bagi perumusan kebijakan (implikasi praktis)

1. Implikasi Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan keilmuan dalam bidang ekonomi pembangunan, khususnya dalam kajian kemiskinan dan pembangunan manusia.

- a. Temuan mengenai pengaruh negatif dan signifikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap kemiskinan memperkuat validitas empiris teori *Capability Approach* dari Amartya Sen (1999). Penelitian ini menyatakan bahwa kemiskinan bukan semata-mata masalah kekurangan pendapatan, melainkan akibat dari kegagalan kapabilitas dasar manusia. Meningkatnya IPM melalui perbaikan kualitas pendidikan dan kesehatan terbukti secara statistik mampu memperluas “kebebasan” individu untuk mencapai standar hidup yang layak, sehingga teori ini tetap relevan untuk dijadikan landasan analisis ekonomi di Indonesia
- b. Temuan bahwa ketimpangan pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan mendukung pandangan strukturalis bahwa pertumbuhan ekonomi tanpa pemerataan (*growth without equity*) tidak akan efektif dalam mengentaskan kemiskinan. Ketimpangan distribusi pendapatan terbukti menjadi faktor struktural yang membatasi kemampuan kelompok berpendapatan rendah untuk meningkatkan kesejahteraan, sehingga berkontribusi terhadap persistensi kemiskinan. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan

relevansi pendekatan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan dalam menjelaskan dinamika kemiskinan.

- c. Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Pengangguran berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kemiskinan memberikan implikasi teoritis bahwa hubungan antara pasar tenaga kerja dan kemiskinan tidak selalu bersifat langsung. Temuan ini memperkaya literatur dengan menunjukkan bahwa kemiskinan lebih tepat dipahami sebagai kondisi keterbatasan struktural dan multidimensional, di mana status bekerja atau tidak bekerja belum sepenuhnya mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Secara keseluruhan, penelitian ini berkontribusi dalam memperkuat kerangka teoritis yang memandang kemiskinan sebagai fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh interaksi berbagai aspek pembangunan ekonomi dan sosial.

2. Implikasi Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan masukan bagi pemangku kebijakan khususnya pemerintah pusat dan daerah, dalam merumuskan kebijakan pengentasan kemiskinan.

- a. Temuan mengenai pentingnya peran IPM dalam menurunkan kemiskinan, pemerintah perlu memprioritaskan alokasi anggaran belanja negara (APBN/APBD) untuk sektor Pendidikan dan Kesehatan secara berkelanjutan. Program-program perlindungan sosial seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan beasiswa pendidikan (KIP, KJMU) tidak boleh dipandang sebagai beban anggaran, melainkan sebagai investasi jangka panjang yang paling efektif untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
- b. Temuan bahwa pengangguran tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kemiskinan juga memberikan implikasi bahwa kebijakan ketenagakerjaan tidak cukup hanya diarahkan pada penciptaan lapangan kerja (*job creation*), tetapi harus beralih pada peningkatan kualitas pekerjaan (*decent work*). Pemerintah dapat membuat kebijakan yang diarahkan pada pemberdayaan sektor informal dan UMKM, seperti memfasilitasi akses permodalan, pelatihan vokasi (seperti program Kartu Prakerja) yang relevan dengan kebutuhan industri, serta jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja informal. Hal ini bertujuan agar mereka yang bekerja pada sektor tersebut dapat memperoleh pendapatan yang layak di atas garis kemiskinan.
- c. Sebagai upaya untuk mengatasi dampak buruk ketimpangan pendapatan, pemerintah perlu menerapkan kebijakan fiskal yang lebih pro-pemerataan. Hal ini dapat dilakukan melalui optimalisasi pajak progresif, pembangunan infrastruktur yang terfokus di luar pulau Jawa dan daerah tertinggal, serta memastikan penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran pada kelompok masyarakat 40% terbawah. Langkah-langkah tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa hasil pembangunan dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga jurang pemisah antara kelompok kaya dan miskin dapat dipersempit.

DAFTAR PUSTAKA

Amponsah, M., Agbola, F. W., & Mahmood, A. (2023). The relationship between poverty , income inequality and inclusive growth in Sub-Saharan Africa. *Economic Modelling*, 126(October 2022),

106415. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2023.106415>
- Ani Winata, W. P., & Wakhid, M. M. (2024). Pengaruh Pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. *Jae: Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi*, 9(3), 13–21. <https://doi.org/10.29407/jae.v9i3.23494>
- Arianto, E., & Cahyono, E. (2025). The Effect of Human Development Index and Unemployment on Poverty in Indonesia 2018-2023. *Finance : International Journal of Management Finance*, 2(4 SE-Articles), 59–64. <https://doi.org/10.62017/finance.v2i4.83>
- Aryanti, E. D., & Sukardi, A. S. (2024). Pengangguran, pendidikan, kesehatan, dan ketimpangan pendapatan terhadap kemiskinan di Indonesia. *Journal of Economics Research and Policy Studies*, 4(2), 117–133. <https://doi.org/10.53088/jerps.v4i2.918>
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Indeks Pembangunan Manusia 2024* (Vol. 19).
- Bahasoan, A. N., Soumena, F. Y., & Arsyad, R. (2023). Identifying Increasing Poverty in Indonesia : Does the Human Development Index and Unemployment Affect Poverty in Indonesia ? *Migration Letters*, 20, 585–605.
- Chayyani, N. R. (2021). Ketimpangan Pendapatan Dan Pemulihan Ekonomi Nasional. *The Indonesian Institute Center of Public Policy Research*, 1–25. <https://www.theindonesianinstitute.com/wp-content/uploads/2021/11/Ketimpangan-Pendapatan-dan-PEN-Nuri.pdf>
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Dahliah, D., & Nirwana Nur, A. (2021). The Influence of Unemployment, Human Development Index and Gross Domestic Product on Poverty level. *Golden Ratio of Social Science and Education*, 1(2 SE-Articles), 95–108. <https://doi.org/10.52970/grsse.v1i2.84>
- Fauzi Nur Kholis, & Gunarto, T. (2025). Analisis Pengaruh Kesenjangan Sosial, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Provinsi Lampung (2012-2023). *ECo-Buss*, 7(3), 2128–2142. <https://doi.org/10.32877/eb.v7i3.2243>
- Ghozali, I., & Ratmono, D. (2017). *Analisis Multivariat dan Ekonometrika. Teori, Konsep dan Aplikasi dengan EViews10 Edisi 2* (2nd ed.). Badan Penerbit - Undip.
- Gujarati, D. N. (2004). *Basic Econometrics* (4th ed.). McGraw-Hill.
- Hakim, M. L. (2024). Dinamika Kemiskinan dan Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). *Jurnal Perencanaan Pembangunan*, 1, 24–39. <https://journal.sleman kab.go.id/index.php/jps/article/download/13/29/326>
- Hermanto, N. (2018). Pengentasan Kemiskinan di Perdesaan: Pengembangan SDM, Penguatan Usaha, dan Inovasi Pertanian. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 35(2), 139. <https://doi.org/10.21082/fae.v35n2.2017.139-150>
- Howard, M. W., & Carter, V. J. (2020). *Income Inequality*. Encyclopedia Britannica. <https://www.britannica.com/money/income-inequality>
- Ishak, K. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengangguran dan Inflikasi terhadap Indeks Pembangunan di Indonesia. *Iqtishaduna*, 7(1), 22–38.
- Judijanto, L., & Al-Amin. (2025). Ketidakmerataan Kekayaan: Kajian Literatur tentang Implikasi Sosial dan Ekonomi. *Journal of Community Dedication*, 5(1), 61–60. <https://adisampublisher.org/index.php/pkm/article/download/1008/1051/2005>
- Lazuardi, D., Gustina, I., Wahyuni, P., & Rinaldi, M. (2025). *Peningkatan Akses Layanan Dasar Untuk Mengurangi Kemiskinan : Pendekatan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Di Kota Medan*. 18(2).
- Marini, L., & Putri, N. T. (2020). Peluang Terjadinya Pengangguran Di Provinsi Bengkulu : Seberapa Besar? *Convergence: The Journal of Economic Development*, 1(2), 70–83. <https://doi.org/10.33369/convergence-jep.v1i2.10900>

- Marpaung, R. A. R., Sintia, I., & Rahayu, F. (2023). Analysis of the Effect of Open Unemployment Rate and Human Development Index on Poverty in North Sumatra Province. *Indonesian Journal of Advanced Research*, 2(5 SE-Articles), 361–376. <https://doi.org/10.55927/ijar.v2i5.4141>
- Maskur, S. R. R., Aedy, H., Saenong, Z., Tajuddin, Alwi, S., & Barani, L. O. S. (2023). Pengaruh Ketimpangan Pendapatan, Pengangguran dan Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan di Indonesia Periode 2017 - 2021. 8(2010), 82–95. <http://ojs.uho.ac.id/index.php/JPEP>
- Moatsos, M., & Lazopoulos, A. (2021). Global poverty: A first estimation of its uncertainty. *World Development Perspectives*, 22, 100315. <https://doi.org/10.1016/j.wdp.2021.100315>
- Mulyani, I., & Ridha, A. (2024). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Ketimpangan Pendapatan dan Tingkat Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh. *Bussiness and Management Issues*, 2, 123–138. <https://doi.org/10.47134/jebmi.v2i1.544123> <https://economics.pubmedia.id/index.php/jebmi>
- Napitupulu, R. B., Simanjuntak, T. P., Hutabarat, L., Damanik, H., Harianja, H., Sirait, R. T. M., & Tobing, C. E. R. L. (2021). *Penelitian Bisnis: Teknik dan Analisa Data dengan SPSS - STATA - EVIEWS* (1st ed.). Madenatera Publishing.
- Nauval, M., Mutia, A., & Agusriandi. (2025). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Kemiskinan di Kota Jambi dari Tahun 2017-2023*. 9(1), 1–19.
- Nurrahmah, A., Ningsih, R. S., Dafa, N., Elsabela, D., Metalin, A., Puspita, I., & Surabaya, U. N. (2024). Menelusuri Akar Kemiskinan Di Indonesia: Strategi Dan Harapan Untuk Masa Depan. *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia*, 1(4), 31–34.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2024). *OECD Economic Surveys: Indonesia 2024* (Issue November). <https://doi.org/10.1787/de87555a-en>
- Ponto, V. M. (2023). Peningkatan Produktivitas Dalam Rangka Mewujudkan Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (Tujuan ke-8 Sustainable Development Goals). *Trade Development and Studies*, 7, 85–96. <https://kudagang.kemendag.go.id/repo/id/eprint/19/1/792-Article Text-5412-1-10-20230810.pdf>
- Rahmaningtyas, V., & Adianita, H. (2023). The Effect of Open Unemployment Rate , Education Level and Labor Force on Poverty in Indonesia 2018-2022. *Internation Journal Economics Development Research*, 4(4), 2044–2054.
- Ratnasari, L. (2017). Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 5(2), 32–36. <https://doi.org/10.22437/pdpt.v5i2.4100>
- Rivana, M., & Gani, I. (2024). Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka dan Indeks Pembangunan Manusia serta Upah Minimum terhadap Kemiskinan. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 20(1), 51–60.
- Romzi, A. S., Purnama, A., & Nusamuda, I. (2024). Pengaruh Ketimpangan Ekonomi Terhadap Tingkat. 13, 665–672.
- Sa'adah, S., & Saifudin, Z. (2024). Analysis of the Influence of the Human Development Index (HDI), Gini Ratio , and Unemployment Rate on Poverty with Zakat , Infaq , Alms as Moderation Variables in Indonesia in. *Annual International Conference on Islamic Economics and Business*, 212–220.
- Santoso, D. H., Arsyi, F., Anshari Clarissa, A., Setiawan, I. N., Kurniati, E., & Delyana, S. (2024). *Indeks Pembangunan Manusia 2023*. 18, 1–282.
- Sari, S., & Patimbangi, A. (2022). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Kab. Bone pada Tahun 2011-2021. 3(2), 442–455.
- Sembiring, C., Masinambow, V. A. J., & Tumangkeng, S. Y. L. (2023). Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pendidikan Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Kota-Kota Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 23(2), 25–36.

- Sen, A. (1999). Development as Freedom. In *International Journal* (Vol. 55, Issue 1, p. 160). <https://doi.org/10.2307/40203469>
- Sitompul, E., Harahap, D., & Batubara, S. (2023). *Pengaruh Kemiskinan, Pendidikan, Dan Pengangguran Terhadap Indeks Pembangunan Manusia*. 2(1).
- Stiglitz, J. E. (2015). The Price of Inequality : How Today's Devided Society Endangers Our Future. In *Sustainable Humanity, Sustainable Nature: Our Responsibility* (pp. 379–399). The Pontifical Academy of Social Sciences. https://business.columbia.edu/sites/default/files-efs/imce-uploads/Joseph_Stiglitz/Price of Inequality for Sustainable Humanity.pdf
- Suharnanik. (2023). *Buku Ajar Masalah Ketenagakerjaan dan Pengangguran* (Y. Popiyanto (ed.); 1st ed.). UWKS PRESS Anggota IKAPI No.206/Anggota Luar Biasa/JTI/2018 Anggota APPTI No.002.071.1.12019. https://repository.uwks.ac.id/16088/1/Buku_Masalah_Ketenagakerjaan_dan_Pengangguran_watermark.pdf
- Suhendar, F. A., Sari, R. V., Pangesti, T., Putra, Z. M. G., & Santoso, A. P. A. (2024). *The Impact of Poverty in Indonesia on Education*. 8(2), 1119–1125. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.58258/jisip.v8i2.6682>
- Sukirno, S. (2022). *Makroekonomi Teori Pengantar* (Edisi ke-3). Rajawali Pers. <https://www.rajagrafindo.co.id/produk/makroekonomi-teori-pengantar-edisi-ketiga/>
- Supriawan, E. (2022). *Strategi Mengatasi Ketimpangan Pendapatan di Masyarakat*. 1–13.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic Development Thirteenth Edition* (13th Editi). Pearson Education Limited. <https://lccn.loc.gov/2019035607>
- Tope, P., Kasim, M. Y., & Ichwan, M. (2025). *Impact of Gini Ratio , Economic Growth and Unemployment on Poverty Levels : A Panel Data Analysis*. 15(5), 65–70.
- UNDP. (2023). Human Development Report 2023/2024: Breaking the Gridlock: Reimagining Cooperation in a Polarized World. In *UNDP (United Nations Development Programme)*. <http://report2023-24.hdr.undp.org.s3-website-us-east-1.amazonaws.com/>,
- Wenda, K. N., Wemaf, F. M., & Takin, F. (2025). *Analisis Pengaruh Ketimpangan Pendapatan terhadap Kemiskinan di Provinsi Papua Analisis Pengaruh Ketimpangan Pendapatan terhadap e-ISSN : 2809-8862 Kemiskinan di Provinsi Papua kemiskinannya (Hidir & Jonyanis , n . d . ; Rahayu et al . , 2013). Sebagian b . 15.*
- Win, E. (2018). Kemiskinan Di Indonesia (Faktor-Faktor Penyebab Dan Solusinya). *SOSFILKOM : Jurnal Sosial, Filsafat Dan Komunikasi*, 12(01), 16–21. <https://doi.org/10.32534/jsfk.v12i01.1447>
- Yulsa, H. Della, & Idris. (2024). *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Tingkat Pengangguran Terbuka, Inflasi dan Ketimpangan Pendapatan Terhadap Kemiskinan di Indonesia*.
- Zaid Khoiri, A., Reza Pahlawan, E., & Humaira Samara, F. (2022). *Ketimpangan Pendapatan di Indonesia: Pendekatan Data Panel 2016-2020 Income Inequality in Indonesia: A Panel Data Approach 2016-2020*. 9–10. https://www.researchgate.net/publication/367157631_Ketimpangan_Pendapatan_di_Indonesia_Pendekatan_Data_Panel_2016-2020
- Zanzibar, D., Rahmadhania, F., Kiswanda, R., & Rohmi, M. L. (2024). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Jawa Timur. *Jurnal Economina*, 3(4), 562–574. <https://doi.org/10.55681/economina.v3i4.1296>